

## BAB IV

### UPAYA PEMERINTAH INDONESIA

Sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Bebas-Aktif menuntut peran aktif Indonesia dalam dunia internasional. Salah satu kebijakan luar negeri yang Indonesia terapkan adalah berperan aktif dalam mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pembukaan UUD1945 yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam konflik Arab Saudi – Iran, Arab Saudi – Qatar, dan Suriah merupakan bentuk dari usaha Indonesia mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam tulisan Janice “*Getting to The Table*” usaha fasilitasi yang dilakukan Indonesia dalam mendamaikan konflik tersebut termasuk dalam bagian dari proses pranegosiasi. Janice mengungkapkan bahwa ini merupakan proses penting karena akan berpengaruh terhadap negosiasi jika terjadi.

Dalam menjelaskan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendamaikan konflik-konflik tersebut penulis akan membaginya dalam dua bagian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Tahap pertama merupakan upaya yang dilakukan Indonesia dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Tahap kedua dalam konflik tersebut Indonesia berusaha untuk mencari alternatif penyelesaian konflik yang terjadi.

#### **A. Upaya Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik**

Dalam tahap pranegosiasi pada konflik internasional terdapat berbagai proses untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu negosiasi. Salah satu tahapan awal dalam proses

pranegosiasi tersebut ialah menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi ini dapat dilakukan langsung melalui pihak yang berkonflik atau melalui pihak ketiga. Pada tahap ini terdapat tujuan untuk mengajak pihak-pihak yang terlibat agar memilih jalur negosiasi sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Sehingga komunikasi menjadi salah satu tahapan pertama yang penting karena dengan terjalannya komunikasi oleh pihak-pihak yang berkonflik membuat proses penyelesaian konflik tersebut dapat berjalan baik.

Dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti konflik Arab Saudi-Iran, Qatar, serta Suriah juga melalui proses komunikasi ini. Proses pranegosiasi dianggap telah dimulai jika salah satu atau pihak yang lain terlibat dalam konflik tersebut bersedia atau memilih negosiasi sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk dari menjalin komunikasi. Tentunya dalam proses tersebut bisa saja pihak-pihak yang terlibat dapat menyatakan pernyataan tersebut secara langsung satu sama lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat menyampaikan hal tersebut melalui pihak ketiga seperti yang terjadi dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

Konflik Arab Saudi dan Iran merupakan konflik berkepanjangan yang sering mengalami pasang surut dalam perseteruannya. Pada tahun 2016 lalu hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran kembali memanas setelah Arab Saudi menghukum mati terhadap Nimr Al Nimr pada 2 Januari 2016. Tindakan yang diambil oleh Arab Saudi tersebut memicu kemarahan yang terjadi di Iran. Menyikapi hal tersebut Arab Saudi secara langsung memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menarik kembali diplomat-diplomat yang berada di Iran, serta dilanjutkan dengan pengusiran diplomat Iran.

Eskalasi konflik yang terjadi secara cepat ini direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Langkah awal yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi konflik tersebut ialah menghubungi Sekjen OKI, Menlu Kerajaan Arab Saudi, dan Menlu Republik Islam Iran untuk berunding dan mencari solusi yang baik secara damai, kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 Indonesia menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menyampaikan surat khusus kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Presiden Iran Hassan Rouhani.<sup>35</sup>

Dalam kunjungan lanjutan yang dilakukan Indonesia ke Arab Saudi sebagai rangka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, Raja Salman secara langsung menyambut kedatangan tersebut dan juga menghargai langkah Indonesia sebagai negara pertama yang menyampaikan kesiapan untuk membantu terus terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan bentuk dari kepedulian dan keseriusannya untuk terlibat dalam membantu untuk menenangkan situasi yang terjadi serta mewujudkan perdamaian.

Langkah yang dilakukan Indonesia ini merupakan salah satu cara untuk membuat kedua belah pihak yaitu Arab Saudi dan Iran agar berkomunikasi satu sama lainnya dengan harapan konflik yang terjadi agar segera mereda. Setelah melakukan komunikasi terhadap kedua belah pihak, langkah selanjutnya yang dilakukan Indonesia adalah menawarkan diri sebagai mediator jika negosiasi dapat terwujud. Hal ini mendapatkan apresiasi baik oleh Arab Saudi dan Iran terhadap kesiapan Indonesia untuk

---

<sup>35</sup> Azyumardi Azra, "Indonesia dan Mediasi Konflik Arab Saudi-Iran", diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran?page=all>, pada tanggal 8 Agustus 2018

berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian konflik tersebut. Dukungan tersebut dapat dinyatakan oleh Presiden Iran yaitu Hassan Rouhani yang beranggapan bahwa hubungan dengan Arab Saudi perlu diperbaiki karena jika terus berlanjut akan mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah.<sup>36</sup>

Sebagai dua negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut, konflik yang terjadi dengan Arab Saudi dapat berimbas ke negara sekitarnya dan membuat kawasan tersebut tidak stabil. Arab Saudi juga mendukung untuk terjadinya negosiasi yang ditawarkan oleh Indonesia, namun pihak Arab Saudi mengatakan bahwa mereka siap untuk berdiskusi dan damai dengan Iran jika Iran bersedia menghormati dan berhenti “campur tangan” dalam urusan Arab Saudi. Arab Saudi beranggapan bahwa eksekusi mati terhadap Nimr al-Nimr yang dilakukannya merupakan urusan dalam negerinya.

Berdasarkan dengan apa yang disebutkan oleh Janice bahwa proses pranegosiasi dimulai ketika salah satu atau kedua belah pihak memilih negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Dalam konflik Arab Saudi dan Iran ini dapat dikatakan bahwa telah memasuki tahap pranegosiasi. Indonesia yang memiliki posisi sebagai pihak ketiga dalam konflik tersebut berperan penting karena mampu membantu kedua negara untuk berkomunikasi serta mengajak untuk melakukan negosiasi. Meskipun kedua belah pihak setuju untuk melakukan negosiasi namun hal tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan, karena salah satu pihak mengajukan persyaratan terhadap pihak lainnya agar terwujudnya negosiasi.

---

<sup>36</sup> Kemenlu Republik Indonesia, “*Pesan Damai Presiden RI kepada Iran dan Arab Saudi*”, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/pesan-damai-indonesia-arab-saudi.aspx>, pada tanggal 1 Agustus 2018

Janice menyebutkan proses pranegosiasi merupakan sesuatu yang penting dan memiliki dampak terhadap proses yang terjadi setelahnya yaitu negosiasi. Namun sebelum negosiasi tersebut, pranegosiasi juga berdampak dalam mengagendakan apa yang dibicarakan. Dalam tahap ini pihak-pihak yang terkait akan mengajukan yang disebut '*protective contracts*' dengan tujuan agar jika negosiasi terjadi maka kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Arab Saudi dan Iran dapat dikatakan bahwa jika negosiasi dilakukan kedua belah pihak tidak dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka hingga saat ini belum ada negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Arab Saudi melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Krisis ini konflik terjadi karena Arab Saudi menganggap Qatar menjalin hubungan dekat dengan Iran serta diduga mendukung kegiatan terorisme. Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi tersebut dilanjutkan dengan berbagai larangan yang diberikan kepada Qatar, seperti memerintah warga negaranya untuk pergi dari Qatar, meminta warga negara Qatar yang berada di negaranya untuk segera pulang, hingga larangan lainnya untuk berhubungan dengan Qatar. Krisis ini juga semakin memuncak ketika aliansi dari Arab Saudi seperti Uni Emirat Arab, Mesir dan beberapa negara lainya yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar serta memberlakukan larangan yang serupa.

Dalam krisis diplomatik yang terjadi, Indonesia tidak mengikuti langkah yang diambil oleh negara-negara aliansi dari Arab Saudi tersebut. Ketika konflik tersebut terjadi Menlu Retno melakukan kunjungan ke Doha. Kunjungan ini dilakukan untuk menghubungi menlu yang berada di kawasan Timur Tengah untuk membahas perkembangan konflik tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Qatar,

Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi memberikan pernyataan bahwa Indonesia prihatin dengan situasi yang terjadi. Kemudian Indonesia mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta global. Dalam pernyataan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia berharap semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dapat lebih menahan diri dan mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara berdialog.<sup>37</sup>

Dalam kesempatan lain Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla juga memberikan pernyataan bahwa akan mempelajari lebih jauh lagi tentang permasalahan yang terjadi. Selain itu Indonesia juga akan bersikap netral dalam konflik dan berharap pihak-pihak yang terkait tidak menggunakan jalan kekerasan sebagai penyelesaian dan menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Respon Indonesia yang netral terhadap krisis diplomatik Qatar tersebut membuat Uni Emirat Arab (UEA) memperhitungkan peran Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari utusan UEA yang dikirim ke Indonesia untuk membahas hal ini. Utusan tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, utusan tersebut menyampaikan bahwa UEA menilai Indonesia memiliki kapabilitas yang bagus karena berhubungan dengan baik terhadap pihak-pihak yang terlibat, selain itu Indonesia juga posisinya dinilai seimbang dalam politik luar negerinya dan dinilai selalu ingin memberikan kontribusi dalam terciptanya perdamaian dunia. Dalam pertemuan tersebut utusan UEA juga menyampaikan bahwa menyetujui opsi

---

<sup>37</sup> Muhaimin, "Saudi Cs dan Qatar Perang Diplomatik, Ini Sikap Indonesia", diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1211187/40/saudi-cs-dan-qatar-perang-diplomatik-ini-sikap-indonesia-1496736354>, pada tanggal 11 Agustus 2018

yang ditawarkan oleh Indonesia tentang penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan secara politik yang merupakan opsi terbaik.<sup>38</sup>

Berbeda dengan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran, dalam krisis Qatar negara yang berkonflik saling berkomunikasi untuk mencapai penyelesaian yang terjadi. Kedua belah pihak baik Qatar serta Arab Saudi dan aliansinya bersedia untuk melakukan mediasi. Tidak berbeda dengan sebelumnya, Arab Saudi mengajukan syarat sebelumnya melaksanakan negosiasi untuk berdamai dengan Qatar. Syarat-syarat tersebut berjumlah 13 butir yang disebut sebagai ultimatum, berikut adalah 13 syarat yang Arab Saudi berikan.<sup>39</sup>

1. Menutup Al-Jazeera dan stasiun afiliasinya dan
2. Menutup saluran berita lainnya yang didanai Qatar, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Arabi21, Rassd, Al-Araby Al-Jadeed, dan Middle East Eye.
3. Menutup pangkalan militer Turki di Qatar, dan mengakhiri kehadiran militer Turki dan semua kerja sama militer gabungan dengan Turki di Qatar.
4. Menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Iran. Hanya perdagangan dan perniagaan dengan Iran yang sesuai dengan sanksi AS dan internasional yang diizinkan.

---

<sup>38</sup> Kemenlu Indonesia, "Menlu Retno Terima Utusan Khusus UEA Bahas Krisis Qatar", diakses dari

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Terima-Utusan-Khusus-UEA-Bahas-Krisis-Qatar.aspx>, pada tanggal 7

November 2018

<sup>39</sup> Al Jazeera, di akses dari

<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>, pada tanggal 7

November 2018

5. Mengusir setiap anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan memutuskan hubungan kerja sama militer dan intelijen dengan Iran.
6. "Qatar harus mengumumkan bahwa pihaknya memutuskan hubungan dengan teroris, organisasi ideologis dan sektarian termasuk Ikhwanul Muslimin, Negara Islam Irak dan Syam (NIIS), Al-Qaeda, Hezbollah, dan Jabhat Fateh al Sham, bekas cabang al Qaeda di Suriah" menurut salah seorang pejabat Arab
7. Menyerahkan semua yang ditetapkan sebagai teroris di Qatar, dan menghentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris
8. Mengakhiri campur tangan dalam urusan dalam negeri dan luar negeri empat negara dan berhubungan dengan oposisi politik mereka
9. Menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada warga negara buronan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain.
10. Mencabut kewarganegaraan Qatar bagi warga negara yang ada di mana kewarganegaraan tersebut melanggar undang-undang negara-negara tersebut.
11. Pembayaran ganti rugi untuk perbuatan salah selama bertahun-tahun
12. Pemantauan selama 10 tahun
13. Bergabung dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi, serta mengenai masalah ekonomi, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014.

Banyak dari syarat tersebut dimaksudkan untuk memangkas kedaulatan negara Qatar, membungkam kebebasan berbicara, serta menerapkan audit dan mekanisme masa percobaan untuk Qatar. Kemudian



Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Mohammed bin Abdulrahman al Thani menyatakan bahwa daftar permintaan yang diserahkan pada 22 Juni itu sengaja dibuat sedemikian rupa agar ditolak Qatar. Dengan adanya penolakan dari Qatar tidak berujung pada negosiasi.

Posisi Indonesia dalam konflik ini belum mendapatkan peran yang besar meskipun dianggap mampu oleh UEA untuk menjadi mediator, namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengambil keputusan agar tidak terburu-buru untuk mengusulkan Indonesia menjadi penengah dalam krisis tersebut. Butuh sosok yang disegani di kawasan Timur Tengah untuk bisa menjadi mediator. Namun, Retno tidak menutup pintu jika negara-negara Timur Tengah itu membutuhkan bantuan Indonesia.

Serta dalam kunjungan yang dilakukan oleh wakil dari UEA kedua menteri sepakat bahwa upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh Kuwait adalah langkah terbaik. Retno juga mengatakan bahwa Kuwait sejauh ini sudah dapat memenuhi kualitas untuk menjadi mediator negara-negara yang terlibat konflik di kawasan tersebut. Belum lagi pengalaman mediasi yang dilakukan Kuwait pada 2013-2014 lalu yang menjadikan negara itu, dipandang oleh negara sekitarnya. Indonesia juga berharap apa yang ditawarkan oleh Kuwait dapat didukung oleh negara-negara inti yang ada di kawasan teluk, juga kepada negara eropa yang berkepentingan dengan hubungan tersebut.

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Suriah. Kekecewaan masyarakat terhadap Bashar Al-Assad dengan banyak kebijakannya yang menyulitkan mayoritas masyarakat membuatnya banyak mendapatkan kritik. Hal tersebut memuncak setelah terjadinya *Arab Spring* yang memberanikan masyarakat untuk melawan perlakuan yang selama ini dilakukan oleh Bashar Al-Assad terhadap

mereka. Dimulai dari demonstrasi yang dilakukan diberbagai kota kemudian berujung pada pecahnya perang senjata antara pihak militer dengan masyarakat Suriah yang bergabung dan membentuk kelompok militer.

Dalam konflik Suriah Indonesia mengambil langkah untuk terwujudnya perdamaian dengan cara menyarankan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk tetap tenang dan mengambil langkah diplomasi sebagai jalan untuk perdamaian. Pemerintah Indonesia menunjukkan kekecewaanya terhadap pihak Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa serangan rudal Tomahawk yang dilakukan oleh AS ke Suriah merenggut banyak korban jiwa, dan mengetuk aksi tersebut yang merupakan aksi unilateral. Pihak AS menyatakan bahwa hal tersebut dilakukannya sebagai respon serangan senjata kimia yang dilakukan oleh kelompok Bashar Al-Assad meskipun pemerintah menyangkal melakukan hal tersebut.<sup>40</sup>

Posisi Indonesia sangat mengutuk penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban, terutama warga sipil yang tidak bersalah dalam perang tersebut. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin serangan unilateral dari pihak manapun. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Indonesia tidak berada di pihak Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi. Namun Indonesia tidak hanya kecewa terhadap tindakan AS yang secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB tersebut, Indonesia juga menyangkan penggunaan gas sarin oleh pemerintah

---

<sup>40</sup> Ninik Yuniati, "*Indonesia Kecam Serangan Amerika ke Suriah*", diakses dari <https://kbr.id/nasional/04-2017/indonesia-kecam-serangan-amerika-ke-suriah/89626.html>, pada tanggal 22 Juli 2018

Suriyah yang menewaskan 80 warga sipil di Kota Khan Sheikhun, Provinsi Idlib, Suriyah.<sup>41</sup>

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa posisi Indonesia tidak memihak salah satu pihak tertentu dalam konflik yang terjadi. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga memberikan kecaman keras terhadap penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun.<sup>42</sup> Selain itu pemerintah Indonesia juga meminta semua pihak yang terlibat agar dapat menghormati nilai dan hukum internasional, khususnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia juga menyerukan bahwa perang bukanlah solusi dalam konflik di Suriyah. Oleh sebab itu, pemerintah menyerukan agar konflik ini diselesaikan dengan jalan dialog.

### **B. Usaha Indonesia dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi**

Peran aktif yang dilakukan Indonesia dalam melibatkan diri untuk membantu membentuk perdamaian yang terjadi terhadap konflik-konflik di Timur Tengah tidak hanya melalui komunikasi yang dilakukan kepada negara-negara yang berkonflik saja, namun Indonesia juga memanfaatkan pihak lainnya untuk mencari alternatif lainnya sebagai solusi penyelesaian konflik-konflik tersebut. Salah satu langkah yang diambil Indonesia sebagai salah satu alternatif

---

<sup>41</sup> Nur Indah Fatmawati, "Guru Besar UI: Indonesia Ambil Sikap Tepat atas Konflik AS-Suriyah", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3469810/guru-besar-ui-indonesia-ambil-sikap-tepat-atas-konflik-as-suriyah>, pada tanggal 22 Juli 2018

<sup>42</sup> "Indonesia dorong konflik Suriyah diselesaikan dengan jalur damai", 2017, diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/166358-indonesia-dorong-konflik-suriyah-jalur-damai>

dalam usahanya untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik di Timur Tengah yaitu dengan memanfaatkan organisasi internasional.

Beberapa organisasi internasional yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan saran serta menyuarakan tentang kepedulian Indonesia terhadap konflik-konflik yang terjadi di kawasan teluk tersebut ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia menganggap bahwa kedua organisasi ini memiliki peran yang penting serta dapat menjadi media untuk mendamaikan konflik-konflik yang terjadi. PBB merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap mewujudkan kedamaian dunia tentunya membuat organisasi ini memiliki kewajiban dalam mewujudkan perdamaian, termasuk juga di kawasan Timur Tengah. Selain itu OKI merupakan organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan solidaritas Islam antarnegara anggota juga seharusnya memiliki peran yang penting dalam meredakan konflik-konflik di kawasan tersebut. Stabilitas yang terganggu di kawasan Timur Tengah tersebut terjadi karena konflik yang terjadi diantara sesama anggota OKI, seperti Arab Saudi – Iran, krisis diplomatik Qatar, serta Suriah. Dengan begitu diharapkan bahwa OKI dapat membantu mendamaikan konflik yang terjadi antara sesama anggotanya. Indonesia yang termasuk sebagai anggota didalam kedua organisasi tersebut juga dapat mengambil peran aktif, dengan mengajak serta mendorong kedua organisasi agar lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian.

#### a. Organisasi Konferensi Islam

OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama

para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011.

Dalam konflik Arab Saudi dan Iran Salah setelah proses dari pranegosiasi berakhir dengan tidak baik, Indonesia menggunakan salah satu organisasi internasional yaitu Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melanjutkan usahanya dalam mendamaikan kedua belah pihak. Dalam meredakan konflik antara Arab Saudi dan Iran di organisasi tersebut Indonesia mengajak negara-negara yang termasuk sebagai anggota OKI untuk ikut serta dan aktif dalam mendamaikan kedua pihak.

Kemudian Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menawarkan Arab Saudi dan Iran bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara mengajak negara-negara lain berpartisipasi untuk mencari cara penyelesaian yang baik dengan konferensi. Dalam hal ini OKI menjadi wadah untuk memfasilitasi dan mengumpulkan solusi dari negara-negara anggota yang termasuk juga Arab Saudi dan Iran, sehingga konflik dapat terselesaikan. Sebagai sesama anggota pemerintah Indonesia berharap dengan mengajak pihak-pihak lain tersebut Indonesia berharap akan ada lebih banyak solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI ke-13 di Istanbul, Turki, Pada 14-15 April 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam KTT tersebut sependapat dengan pernyataan Erdogan yang berisi mendesak OKI mengakhiri perpecahan sektarian dalam komunitas Islam, Sementara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyerukan pentingnya OKI dalam

penyelesaian perbedaan dan konflik secara damai. Semua ini sesuai dengan semangat KTT yang bertemakan "Persatuan dan Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian."<sup>43</sup>

Dalam melakukan upayanya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi konflik yang terjadi di Suriah. Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan Organisasi Islam terbesar di dunia mengambil inisiatif untuk ikut serta menjadi bagian dari upaya mencari sebuah solusi untuk dapat mengakhiri konflik saudara di Negara Suriah. Sebagai langkah Kongret OKI berencana menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Mekkah, Arab Saudi yang mana KTT ini yang akan di gelar membahas khusus mengenai konflik yang terjadi di Negara Suriah.

Hal ini merupakan sebuah upaya konkret yang dilakukan OKI, untuk mengakhiri konflik ini OKI melakukan langkah-langkah dengan mengirimkan tim peninjau ke negara Suriah yang mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya hal ini bertujuan agar pemerintah negara Suriah segera menghentikan kekerasan yang sedang terjadi, OKI juga menuntut Assad meninggalkan kekuasaan dan bersiap untuk memasuki masa transisi pasca- rezim Bashar al-Assad, OKI juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membantu menyelesaikan konflik di Negara Suriah. Selain itu langkah OKI yang baru-baru ini diambil adalah mengadakan sebuah pertemuan darurat Komite Eksekutif yang mana pertemuan ini adalah atas permintaan Negara Kuwait, hal ini di

---

<sup>43</sup> Kementrian Luar Negeri Indonesia, "*Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 Organisasi Kerja Sama Islam*", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Konferensi-Tingkat-Tinggi-ke-13-Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx>, pada tanggal 17 November 2018

karenakan semakin memburuknya situasi dan kondisi kemanusiaan di Kota Aleppo, Suriah.

Pidato Presiden RI saat itu Sulsilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 OKI di Mesir yang mengusulkan tiga cara untuk meningkatkan peran dan kapasitas OKI dalam menciptakan perdamaian dunia, kesejahteraan dan mempromosikan demokrasi dan HAM, yaitu:<sup>44</sup>

Pertama adalah OKI harus menjadi net-contributor perdamaian dan keamanan dunia. *“Pertama, organisasi kita harus menjadi net contributor terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Dengan menjadi net contributor, OKI akan dapat membantu mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan umat seperti konflik Suriah. Di Suriah kita perlu bekerjasama mengakhiri konflik dan kekerasan. Penting bagi OKI mempunyai satu pandangan untuk mendorong gencata senjata secepatnya dan mengakhiri pertumpahan darah, memungkinkan adanya bantuan kemanusiaan dan menyetting proses politik yang merefleksikan dan menghormati keinginan rakyat Suriah.”*

Kedua, OKI harus menjadi contributor pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kesejahteraan dunia. *“Negara-negara OKI memiliki dua pertiga migas dunia, kombinasi GDP kita merepresentasikan 8.3% ekonomi global. Kita bisa berbuat lebih banyak karena ada fakta sebagian besar umat berada dibawah garis kemiskinan.”*

---

<sup>44</sup> Diakses dari

<http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2013/02/06/8731.html>

Ketiga, Oki harus menjadi net-contributor dalam mendorong demokrasi dan memproteksi HAM. Untuk itu OKI harus memperkuat mekanisme *Independent Permanent Human Right Commission* (IPHRC) dalam OKI. Menurut beliau OKI juga harus berperan di tingkat global dengan mengintensifkan kontribusinya dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar keyakinan dalam masyarakat internasional.

Dalam Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri ke-43 OKI di Tashkent, Uzbekistan pemerintah Indonesia kembali menungkit tentang pembentukan *Contact Group on Peace and Conflict Resolution* (CG-PCR). *Contact Group on Peace and Conflict Resolution* merupakan gagasan Presiden Joko Widodo yang awalnya diusulkan pada pertemuan *Informal Gathering on Strengthening Solidarity and Cooperation in the Islamic World*, 22 April 2015, di sela-sela Peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika di Jakarta 19-24 April 2015.<sup>45</sup>

Pada pertemuan tersebut Menlu Indonesia menyampaikan serta meyakinkan 55 anggota OKI yang hadir bahwa CG-PCR tidak hanya memberikan negara OKI forum untuk berbagi pengalaman dan strategi mengenai berbagai permasalahan politik dan keamanan di dunia Islam, namun juga dapat memberikan masukan bagi solusi yang bersifat fungsional dan action-oriented. CG-PCR perlu dimanfaatkan sebagai forum untuk berbagi pengalaman, strategi serta pengetahuan dalam mencari

---

<sup>45</sup> Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/OKI-Sepakati-Pendirian-Contact-Group-on-Peace-and-Conflict-Resolution.aspx>



solusi bersama bagi berbagai tantangan yang dihadapi umat muslim.<sup>46</sup>

Secara khusus diharapkan CG-PCR dapat dimanfaatkan oleh negara OKI guna menyusun strategi bersama dalam menghadapi permasalahan, seperti dalam memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Selain itu, melalui CG-PCR anggota OKI juga diharapkan dapat memberikan masukan dan mencari solusi terhadap berbagai konflik yang dihadapi oleh berbagai negara OKI, baik konflik yang bersifat intra-state maupun inter-state.

KTT tersebut akhirnya mengesahkan resolusi mengenai pembentukan Contact Group on Peace and Conflict Resolution (CG-PCR). Setelah pengesahan Resolusi pendirian CG-PCR ini, negara anggota OKI serta Sekretariat OKI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai modalitas serta format pertemuan dari CG-PCR. Hal ini agar modalitas dan format CG-PCR dapat memastikan forum tersebut bersifat member-states driven serta melakukan pembahasan secara fokus.

#### b. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations atau UN). Pengertian PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya mencakup hampir seluruh negara di dunia. Lembaga PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi persoalan hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Dalam konflik Suriah pemerintah Indonesia juga memanfaatkan organisasi PBB ini sebagai salah satu media

---

<sup>46</sup> Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/OKI-Sepakati-Pendirian-Contact-Group-on-Peace-and-Conflict-Resolution.aspx>

untuk menyampaikan pentingnya diwujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dunia internasional, Indonesia berharap dengan menyampaikan gagasan dan dorongan agar PBB dapat mampu lebih aktif lagi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Dalam konferensi Jenewa mengenai Suriah yang dilaksanakan oleh PBB di Montreux, Swiss. Pada saat itu menteri luar negeri Indonesia yaitu Marty Natalegawa menyampaikan tentang harapan bahwa pertemuan yang dilaksanakan agar dapat menghasilkan 3 output dalam menyelesaikan masalah dan mengakhiri bencana kemanusiaan di Suriah, yaitu:<sup>47</sup>

1. Memastikan kembali penyelesaian politik yang komprehensif dan inklusif oleh rakyat Suriah sendiri dan tidak lagi melibatkan kekuatan militer. Penyelesaian yang langgeng dan menyeluruh hanya dapat dicapai melalui solusi politik dan kesepakatan yang dicapai diantara para pihak terkait di Suriah sendiri - dan didukung oleh masyarakat internasional. Suatu solusi yang memberikan suatu peta jalan yang memastikan diharganya keinginan dari rakyat Suriah. Negara-negara, baik kawasan dan luar kawasan, harus bertindak bersama dan dalam satu kesatuan untuk mendesak adanya suatu solusi politik. Masyarakat internasional harus bertindak secara mendesak dan dengan tekad kuat, agar konflik bersenjata, ditengah situasi politik Suriah yang

---

<sup>47</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, "*PERNYATAAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA KONPERENSI JENAWA MENGENAI SURIAH*", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/Documents/Geneva%2011%20on%20Syria/Pernyataan%20Geneva%202%20terjemahan.pdf>, pada tanggal 17 November 2018

semakin kompleks dan terkotak-kotak, tidak terus berlanjut. Pihak-pihak yang terlibat konflik di Suriah harus didukung dengan insentif positif dan dorongan untuk berani memilih suatu penyelesaian politik. Masyarakat internasional harus membantu mempromosikan suatu iklim yang kondusif – dengan cara tegas dan bahkan agresif - yang dapat mendorong semua pihak ke arah meja perundingan dan bukan medan perang. Masyarakat internasional harus memfasilitasi, bukan kearah pertumpahan darah dan konflik tak berujung, sebaliknya kearah terwujudnya dialog dan perundingan.

2. Memprioritaskan gencatan senjata untuk menghentikan tragedi kemanusiaan dan penderitaan pihak-pihak yang menjadi korban dalam konflik di Suriah. Hal tersebut saat ini harus menjadi prioritas utama. Hal itu adalah kunci jika penderitaan kemanusiaan yang terjadi akan dihentikan dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan dapat disalurkan. Dan, hal itu juga sangat diperlukan jika ingin tercipta ruang bagi bergulirnya proses politik yang inklusif pada tahapan yang paling dini dan tentatif sekalipun. Pertemuan hari ini harus mendorong dideklarasikannya penghentian kekerasan bersenjata dan menunjukkan bahwa masyarakat internasional siap untuk memastikan bahwa hal ini akan dipatuhi semua pihak.
3. Mempercepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini dilakukan oleh semua pihak yang harus memastikan tidak adanya hambatan-hambatan terhadap penyaluran peningkatan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Kebutuhan dan kepentingan dari kelompok sipil yang telah lama menderita harus menjadi prioritas.

Pembicaraan untuk perdamaian konflik di Suriah ini tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan masyarakat yang memberontak, namun juga negara-negara yang ikut campur dalam konflik tersebut sehingga sulit tercapai. Maka dari itu saat ini Indonesia hanya mampu untuk menyuarakan perdamaian dan meminta pihak yang terlibat untuk tidak memperburuk konflik.